

DAFTAR PUSTAKA

- Amrozi, Akhmad Imam. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*. 1(1): 1-12.
- Andirfa, Mulia. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. 5(3): 30-38.
- Anggraeni, Astried. 2016. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Basri, F dan Munandar, H. 2010. *Dasar – Dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan & Aplikasi Metode Kuantitatif, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Gafar, Akbar Abdul. 2019. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Provinsi Maluku Utara 2014-2018)*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 4*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (SAP Berbasis Akrua) Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imran, Haliah. 2009. *Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintahan Daerah*. Makassar: Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah (PPKED) Universitas Hasanuddin.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang)*. Jakarta: Erlangga.
- Kusumawati, Lily., dan Wiksuana, I Gusti Bagus. 2018. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-jurnal Manajemen Unud*. 7(5): 2592-2620.
- Laga, Elfrida I.B. 2019. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel*

Intervening Pada Kota Kupang Tahun Anggaran 2008-2017. Skripsi tidak diterbitkan. Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mangkosoebroto, Guritno. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Modebe, N.J., Regina, G., Okafor, J.U.J., Onwumere, dan Imo, G. I. (2012). Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria's Economic Growth. *European Journal of Business and Management*, 4(19): 66-74.

Mukarramah., Yolanda, Cindy., dan Zulkarnain, Muhammad. 2019. Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*. 3(2): 105-117.

Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Diponegoro*. 1(2): 1-14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. 2008. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2019. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta.

Rusmana, Oman., Setyaningrum, Dyah., Yuliansyah dan Maryani. 2017. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Rostow, dan Musgrave. (1996). *Pembangunan Ekonomi. Ekonomi Perencanaan Pembangunan*. Terjemahan oleh Drs. Benyamin Molan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka.

Sa'adah, Neilis. 2019. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah)*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sawir, Agnes. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian Edisi 1*. Depok: Rajawali Pers.

Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2014. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta.

Waryanto, Puput. 2017. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. 1(2): 35-55.

Yunus, Said., dan Amirullah. 2019. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten-kabupaten di Provinsi Aceh). *Jurnal Samudra Ekonomika*. 3(2): 186-193.

_____. 2019. Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2019. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.

_____. 2020. Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Mei 2020. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.

_____. 2020. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2015-2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

_____. 2020. Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

_____. 2021. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

LAMPIRAN

Lampiran 1

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Muh. Resa Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Toli-toli, 28 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : BTN. Saocitra Permai, Cemmeng, Kab. Sinjai
Telpon Rumah dan HP : 082348820330
Alamat *E-mail* : muh.resa28@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. 2003-2004 : TK Kemala Bhayangkari Sinjai
2. 2004–2005 : SD Negeri 82 Sinjai
3. 2005–2010 : SD Negeri 103 Sinjai
4. 2010–2013 : SMP Negeri 1 Sinjai
5. 2013–2016 : SMK Negeri 1 Sinjai

B. Pendidikan Non Formal

1. Bina Kader Mahasiswa Akuntansi - Ikatan Mahasiswa Akuntansi FEB-UH
2. *Basic Training* - Himpunan Mahasiswa Islam (Hml) Komisariat Ekonomi FEB-UH
3. Latihan Kepemimpinan Tingkat Menengah (LKTM) - SEMA FEB-UH
4. Pengembangan Karakter Religius (PKR) – KMMDI FEB-UH

Pengalaman

A. Organisasi

1. Pengurus Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) FEB-UH – Bendahara Umum Periode 2019-2020.
2. Pengurus Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) FEB-UH – Anggota Departemen Kajian Strategi dan Advokasi Periode 2018-2019

B. Kerja

1. Asisten Dosen Mata Kuliah Akuntansi Dasar – Periode 2018-2019.

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 22 Februari 2021

Muh. Resa Saputra

Lampiran 2: Data Penelitian

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah	Tahun PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
1	Kab. Bantaeng	2015	113.592.885.088	43.800.069.886	2016	4.374.214.690.000
		2016	386.136.000.000	66.246.961.750	2017	4.694.158.300.000
		2017	229.547.101.324	65.202.492.784	2018	5.075.836.510.000
		2018	207.062.877.106	94.630.714.707	2019	5.621.523.480.000
		2019	265.406.928.000	98.818.731.000	2020	5.650.540.000.000
2	Kab. Barru	2015	290.642.502.537	56.315.635.019	2016	3.916.336.130.000
		2016	285.277.000.000	82.525.913.591	2017	4.169.983.810.000
		2017	345.267.023.968	130.579.972.435	2018	4.466.541.170.000
		2018	260.726.828.093	104.627.706.925	2019	4.797.429.680.000
		2019	200.384.025.000	110.014.003.000	2020	4.839.120.000.000
3	Kab. Bone	2015	304.197.875.790	159.866.219.584	2016	17.498.179.410.000
		2016	330.744.000.000	180.156.676.607	2017	18.970.527.040.000
		2017	392.703.473.445	280.478.099.485	2018	20.660.069.290.000
		2018	267.523.362.781	214.246.216.580	2019	22.108.038.470.000
		2019	291.614.284.000	195.573.256.000	2020	22.053.740.000.000
4	Kab. Bulukumba	2015	325.437.878.024	106.037.895.838	2016	7.232.838.240.000
		2016	291.771.000.000	128.236.254.047	2017	7.730.913.320.000
		2017	344.329.475.188	201.080.429.101	2018	8.121.327.630.000
		2018	305.330.125.770	137.711.717.885	2019	8.567.455.140.000
		2019	265.596.856.000	194.290.833.000	2020	8.604.200.000.000

5	Kab. Enrekang	2015	257.924.165.935	49.214.800.280	2016	3.899.586.300.000
		2016	329.905.000.000	56.383.446.989	2017	4.166.404.660.000
		2017	200.088.477.045	99.669.276.952	2018	4.302.051.170.000
		2018	160.111.439.072	66.043.333.304	2019	4.535.550.620.000
		2019	181.804.016.000	109.257.213.000	2020	4.592.230.000.000
6	Kab. Gowa	2015	385.797.162.253	154.772.384.000	2016	11.166.021.950.000
		2016	342.476.000.000	187.176.036.301	2017	11.971.358.930.000
		2017	477.894.304.217	268.339.203.299	2018	12.825.807.660.000
		2018	453.678.049.493	217.112.642.503	2019	13.783.114.870.000
		2019	426.179.018.000	198.479.076.000	2020	14.025.760.000.000
7	Kab. Jeneponto	2015	273.345.115.339	61.267.873.859	2016	5.508.828.170.000
		2016	377.593.000.000	77.638.677.214	2017	5.963.562.330.000
		2017	204.476.346.325	97.930.246.320	2018	6.338.740.620.000
		2018	185.649.056.633	91.994.774.095	2019	6.685.623.030.000
		2019	269.960.219.000	140.833.400.000	2020	6.696.420.000.000
8	Kab. Luwu	2015	223.382.859.431	78.558.298.847	2016	8.023.365.310.000
		2016	385.521.000.000	95.564.293.749	2017	8.567.872.020.000
		2017	221.162.518.385	109.172.771.923	2018	9.155.576.300.000
		2018	199.814.400.867	106.865.737.219	2019	9.728.969.450.000
		2019	298.340.989.000	109.652.921.000	2020	9.855.910.000.000
9	Kab. Luwu Timur	2015	385.079.325.804	155.962.924.867	2016	14.862.310.820.000
		2016	501.965.000.000	177.018.897.820	2017	15.318.716.530.000
		2017	394.196.882.765	254.902.886.907	2018	15.837.801.090.000
		2018	424.442.870.690	264.769.982.685	2019	16.022.945.190.000
		2019	399.729.912.000	289.641.415.000	2020	16.256.900.000.000

10	Kab. Luwu Utara	2015	163.022.834.086	84.668.434.157	2016	6.580.897.240.000
		2016	199.740.000.000	140.995.994.107	2017	7.081.166.340.000
		2017	282.857.965.171	109.659.129.505	2018	7.675.196.580.000
		2018	260.147.531.750	113.283.072.478	2019	8.221.198.570.000
		2019	279.196.377.000	121.816.169.000	2020	8.172.740.000.000
11	Kota Makassar	2015	673.026.825.829	828.871.892.853	2016	95.957.638.040.000
		2016	634.537.000.000	971.860.608.473	2017	103.826.155.900.000
		2017	625.019.873.537	1.337.231.094.232	2018	112.568.414.880.000
		2018	746.832.060.455	1.185.453.010.990	2019	122.465.829.070.000
		2019	1.123.952.310.000	1.649.402.916.000	2020	120.905.750.000.000
12	Kab. Maros	2015	325.693.298.837	141.487.685.606	2016	11.953.999.170.000
		2016	422.440.000.000	165.487.675.628	2017	12.768.318.400.000
		2017	359.172.375.516	194.999.053.694	2018	13.558.738.060.000
		2018	411.812.694.455	219.813.979.862	2019	13.726.282.660.000
		2019	360.516.755.000	266.418.500.000	2020	12.233.660.000.000
13	Kota Palopo	2015	137.225.875.160	92.277.790.795	2016	4.428.497.040.000
		2016	353.661.000.000	134.110.076.221	2017	4.745.899.890.000
		2017	288.566.513.023	167.307.131.609	2018	5.102.987.200.000
		2018	238.791.510.667	139.282.846.484	2019	5.447.357.000.000
		2019	220.611.095.000	167.052.192.000	2020	5.472.080.000.000
14	Kab. Pangkep	2015	404.953.048.450	143.977.666.334	2016	14.477.292.270.000
		2016	490.627.000.000	156.226.631.623	2017	15.433.504.470.000
		2017	352.881.444.790	162.621.399.914	2018	16.168.906.230.000
		2018	322.738.156.149	174.288.744.560	2019	17.205.165.390.000
		2019	225.170.979.000	185.326.285.000	2020	16.915.230.000.000

15	Kota Pare-Pare	2015	202.661.769.741	115.369.532.648	2016	4.107.805.850.000
		2016	324.802.000.000	136.313.232.055	2017	4.394.324.350.000
		2017	308.243.662.068	140.621.664.389	2018	4.639.404.860.000
		2018	129.178.327.966	134.343.383.710	2019	4.947.790.350.000
		2019	208.726.040.000	151.920.731.000	2020	4.944.030.000.000
16	Kab. Pinrang	2015	317.031.194.721	97.121.042.698	2016	10.397.105.920.000
		2016	326.597.000.000	113.038.054.428	2017	11.212.623.630.000
		2017	257.496.784.123	118.859.698.609	2018	11.987.443.920.000
		2018	225.073.910.031	130.651.477.245	2019	12.770.078.590.000
		2019	122.601.643.000	111.413.048.000	2020	12.826.450.000.000
17	Kab. Kepulauan Selayar	2015	182.359.601.673	40.231.013.482	2016	2.924.716.090.000
		2016	245.188.000.000	43.167.309.586	2017	3.147.388.580.000
		2017	173.007.970.509	77.300.086.266	2018	3.422.669.550.000
		2018	173.007.970.509	77.300.086.267	2019	3.684.739.260.000
		2019	184.645.894.000	73.912.605.000	2020	3.620.200.000.000
18	Kab. Sidenreng Rappang	2015	326.972.727.600	76.076.376.304	2016	7.179.778.800.000
		2016	419.727.000.000	98.400.923.154	2017	7.688.828.430.000
		2017	434.635.861.641	146.032.092.014	2018	8.075.027.240.000
		2018	317.750.314.929	115.904.953.769	2019	8.450.694.490.000
		2019	265.093.301.000	140.872.160.000	2020	8.401.060.000.000
19	Kab. Sinjai	2015	195.122.366.487	75.599.713.320	2016	5.799.305.710.000
		2016	344.594.000.000	79.491.453.855	2017	6.218.639.840.000
		2017	279.131.920.516	113.973.757.129	2018	6.681.250.200.000
		2018	244.406.179.421	95.221.950.004	2019	7.090.283.640.000
		2019	370.724.063.000	90.402.577.000	2020	7.200.230.000.000

20	Kab. Soppeng	2015	225.924.896.490	68.403.420.035	2016	5.547.690.870.000
		2016	348.423.000.000	91.123.526.502	2017	6.007.455.720.000
		2017	299.133.618.885	125.892.548.021	2018	6.494.392.430.000
		2018	270.264.500.428	131.607.491.254	2019	6.993.513.100.000
		2019	230.796.621.000	106.944.951.000	2020	7.146.650.000.000
21	Kab. Takalar	2015	211.345.905.667	74.827.932.472	2016	5.405.320.370.000
		2016	407.402.000.000	95.625.946.516	2017	5.803.944.310.000
		2017	220.803.936.367	111.702.803.115	2018	6.190.674.120.000
		2018	177.813.211.088	125.186.750.078	2019	6.616.253.760.000
		2019	192.545.828.000	140.821.439.000	2020	6.575.760.000.000
22	Kab. Tana Toraja	2015	261.461.546.613	79.256.819.869	2016	3.666.480.800.000
		2016	212.076.000.000	101.993.901.924	2017	3.940.517.490.000
		2017	320.082.735.096	140.418.241.235	2018	4.251.260.060.000
		2018	249.599.106.962	106.108.442.619	2019	4.558.139.570.000
		2019	247.462.661.000	187.752.107.000	2020	4.545.290.000.000
23	Kab. Toraja Utara	2015	178.680.331.536	33.808.406.730	2016	4.085.687.910.000
		2016	207.462.000.000	34.896.515.042	2017	4.421.680.180.000
		2017	211.570.489.218	44.165.976.209	2018	4.778.534.830.000
		2018	216.243.328.945	52.714.824.265	2019	5.140.012.280.000
		2019	246.290.722.000	56.220.028.000	2020	5.148.550.000.000
24	Kab. Wajo	2015	332.925.095.824	114.351.421.279	2016	11.620.744.820.000
		2016	452.043.000.000	117.782.098.210	2017	12.225.770.130.000
		2017	370.850.927.061	177.730.310.817	2018	12.357.347.800.000
		2018	370.850.927.061	177.730.310.816	2019	12.858.449.690.000
		2019	343.286.751.000	155.454.669.000	2020	12.708.370.000.000

